

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Surat : 9 Agustus 2022	No. Surat : 810/291/Pid.1.1/BKPSDM
Alamat Surat:  Bupati Paser	DITUJUKAN KEPADA  <input checked="" type="checkbox"/> SEKERTARIAT <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM</li> <li><input type="checkbox"/> KASUBBAG KEUANGAN</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> KASUBBAG UMUM &amp; KEPEGAWAIAN</li> </ul> <input type="checkbox"/> BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> KASI PINDAH DATANG PENDUDUK</li> <li><input type="checkbox"/> KASI IDENTITAS PENDUDUK</li> <li><input type="checkbox"/> KASI PENDATAAN PENDUDUK</li> </ul> <input type="checkbox"/> BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN</li> <li><input type="checkbox"/> KASI KELAHIRAN</li> <li><input type="checkbox"/> KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN</li> </ul> <input type="checkbox"/> BIDANG PIAK <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> KASI PENGELOLAAN &amp; PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN</li> <li><input type="checkbox"/> KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN</li> <li><input type="checkbox"/> KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. &amp; KOM.</li> </ul> <input type="checkbox"/> BIDANG PDIP <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> KASI PEMANFAATAN DATA &amp; DOKUMEN KEPENDUDUKAN</li> <li><input type="checkbox"/> KASI KERJASAMA</li> <li><input type="checkbox"/> KASI INOVASI PELAYANAN</li> </ul>
NO. AGENDA	PERIHAL  pendataan Tenaga Non ASN.
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKERTARIS  Segara melengkapi Lokermen yg diperlukan	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 340/DLPS/2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 16 Agustus 2022	



## BUPATI PASER

Nomor : 810/291 /Bid.I.1/BKPSDM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 Lembar  
Hal : Pendataan Tenaga Non ASN

Tana Paser, 9 Agustus 2022

Yth. **Kepala Perangkat Daerah**

di –  
Tempat

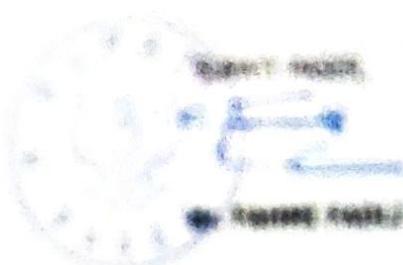
Menindaklanjuti surat menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 prihal pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan perekaman data tenaga Non-ASN Pemerintah Kabupaten Paser mengoptimalkan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dalam hal menunjang kegiatan perekaman tersebut, masing-masing perangkat daerah untuk dapat mempersiapkan data pendukung sesuai dengan kebutuhan.
2. Perekaman data tenaga Non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah. Adapun syarat-syarat yang ditentukan antara lain sebagai berikut :
  - a. Berstatus tenaga honorer kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah;
  - b. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBD dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga, dengan menyampaikan photocopy dan scan dokumen slip gaji awal pengangkatan sampai dengan akhir yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - c. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, dengan menyampaikan Fotocopy (legalisir) dan scan dokumen asli SK Pegawai Non-ASN;
  - d. Melampirkan photocopy (legalisir) dan scan asli ijazah pendidikan terakhir yang berlegalisir, yang dimiliki oleh Pegawai Non-ASN masing-masing perangkat daerah sesuai dengan Pendidikan dalam SK Pegawai Non ASN;
  - e. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2021, Pegawai Non-ASN yang masuk didalam pendataan adalah yang memiliki SK Pegawai Non-ASN TMT 1 Januari 2021;
  - f. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.
3. Data dan dokumen digital yang disiapkan adalah data dan dokumen digital yang dipastikan kebenarannya dan dibuktikan dengan dokumen fisik yang telah dilegalisir dan diarsipkan pada masing-masing perangkat daerah. Kebutuhan data sesuai dengan form terlambpir.
4. Masing-masing perangkat daerah wajib menyesuaikan Referensi Jabatan dan Pendidikan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Tenaga Non-ASN di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

3. Години на която са извършени престъпленията са възможни  
доказателства за престъпленията да са извадени и да са  
извършени от този престъпник.

Изследването трябва да покаже какъв е видът на престъпленията  
които са извършени и да се установят доказателства за  
извършителя на престъпленията.

Изследването трябва да покаже какъв е видът на престъпленията  
~~които са извършени~~.



## RIWAYAT KONTRAK KERJA TENAGA NON ASN DAN EKS THK-II

NO	NIK	NOMOR SK	TANGGAL SK (dd-mm-yyyy)	TANGGAL AWAL KERJA (dd-mm-yyyy)	TANGGAL AKHIR KERJA (dd-mm-yyyy)	INSTANSI PEMERINTAH	UNIT KERJA PEMERINTAH		JABATAN	NIK BAGIAN	PERANGKAT KERJA PUSKESMAS
							KODE	NAAMA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	32313213	AA/1234	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	PEMERINTAH CABUPATEN PASER	BADAN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAN PELATIHAN	123456	ANALIS JABATAN	KEPALA DEPARTEMEN	
2	32313213	CC/131	01-01-2020	01-01-2020	31-12-2020						
3	32313213	bb/1322e	01-01-2019	01-01-2019	31-12-2019						
4	32313213	bb/1321e	01-01-2018	01-01-2018	31-12-2018						
5	32313213	tt/3111	01-01-2017	01-01-2017	31-12-2017						
6	dan seterusnya										

\* Setiap baris WAKIB untuk dipersiapkan dokumen SK PENGANGKATAN yang paling rendah oleh pemimpin unit kerja  
\* setiap baris WAKIB dipersiapkan dokumen BLIKTI PEMBAYARAN HONORARIUM dengan mekanisme pembayaran langsung bersamaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga

### KETERANGAN PENGISIAN:

1. Nomor Urut
2. NIK tenaga NON ASN atau EKS THK-II
3. Nomor SK jabatan pada masyarakat tersebut
4. tanggals SK jabatan pada masyarakat tersebut dengan format (dd-mm-yy)
5. tanggals awal kerja jabatan pada masyarakat tersebut dengan format (dd-mm-yy)
6. tanggals akhir kerja jabatan pada masyarakat tersebut dengan format (dd-mm-yy)
7. instansi pemimpinan pada masyarakat tersebut
8. unit kerja pemimpinan pada masyarakat tersebut
9. kode jabatan pada masyarakat tersebut
10. namakanan jabatan pada masyarakat tersebut
11. penandatanganan SK jabatan pada masyarakat tersebut
12. pembayaran hanya dengan maktoline pembayaran langsung bersamaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga

